**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TAWURAN ANAK YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DI KABUPATEN BREBES**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**MOHAMMAD ADI MULYA**

**NPM. 5120600271**

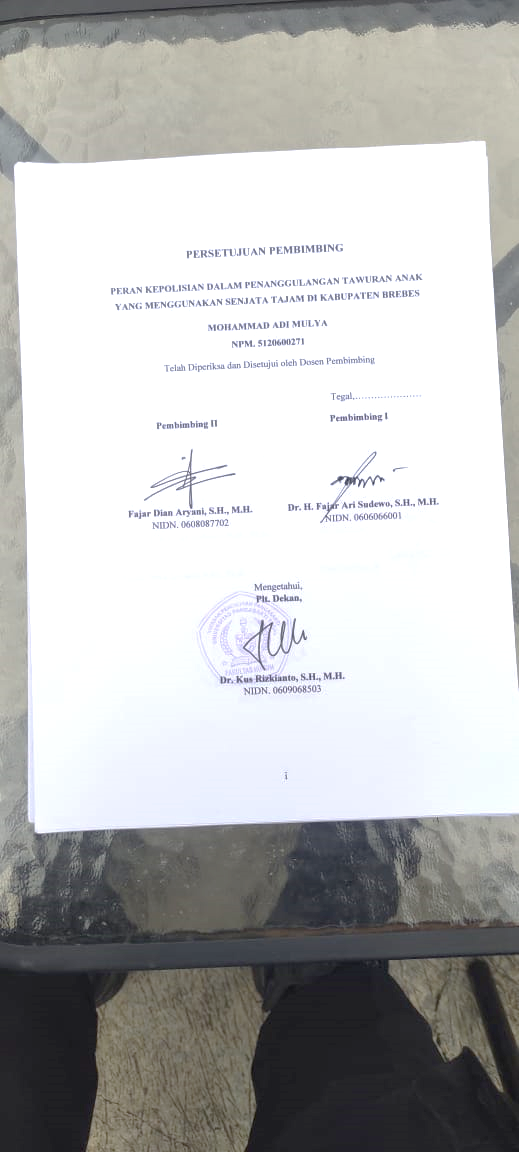
**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

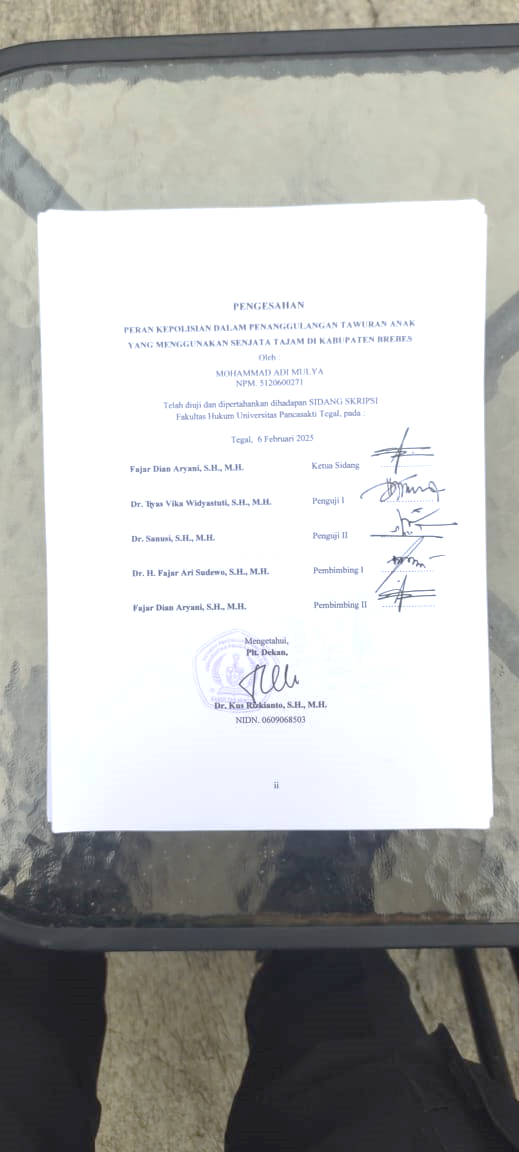
**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2025**

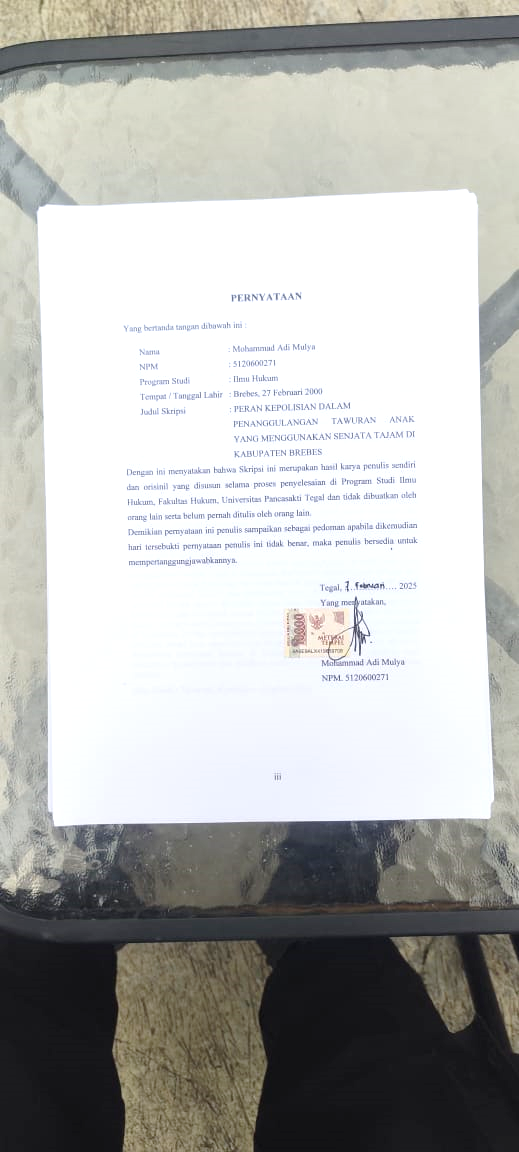
# PERSETUJUAN PEMBIMBING



# PENGESAHAN



# PERNYATAAN



# ABSTRAK

Anak adalah sebagai individu yang unik dan mempunyai kebutuhan sesuai tahap perkembangannya. Sebagai individu yang unik, anak memiliki berbagai kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lain sesuai tumbuh kembang. Tawuran anak atau konflik fisik antar kelompok seringkali terjadi di berbagai daerah, termasuk di Tonjong. Meskipun tawuran anak dapat ditemukan di banyak tempat di Kabupaten Brebes, ada beberapa faktor yang berkontribusi pada fenomena ini, baik yang berasal dari aspek sosial, ekonomi, maupun psikologi remaja itu sendiri. Bahaya tawuran memanglah sangat nyata terlebih lagi ketika para remaja ini membekali diri mereka dengan senjata tajam, tentu saja hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat dan juga terutama orang tua mereka, bisanya senjata tajam yang digunakan para remaja yang tawuran dibuat oleh mereka sendiri tentu saja hal ini menjadi miris dikarenakan mereka para remaja ini yang seharusnya menggunakan kreatifitasnya dibidang akademik malah menggunakan kreatifitasnya di bidang yang salah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kepolisian dalam penanggulangan tawuran anak yang menggunakan senjata tajam di Kabupaten Brebes dan untuk hambatan dalam upaya penanggulangan tawuran anak yang menggunakan senjata tajam di Kabupaten Brebes.

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif yang hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang dengan jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penggabungan antara data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini peran kepolisian dalam menanggulangi tawuran anak yang menggunakan senjata tajam di Kabupaten Brebes merupakan bagian integral dari upaya menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tindakan pre-emtif, seperti sosialisasi hukum dan pembinaan siswa di sekolah, serta pendekatan preventif berupa patroli di lokasi rawan, razia senjata tajam, dan pengawasan intensif terhadap kelompok pelajar berisiko tinggi, telah menunjukkan efektivitas dalam mencegah konflik kekerasan. Hambatan dalam menanggulangi tawuran anak di Kabupaten Brebes menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak hanya bersifat kriminal, tetapi juga mencerminkan kompleksitas sosial, budaya, dan ekonomi. Rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelajar membuat mereka tidak memahami konsekuensi dari tindakan membawa senjata tajam dan terlibat dalam tawuran.

***Kata Kunci : Tawuran, Kepolisian, Senjata Tajam***

# ***ABSTRACT***

*Children are unique individuals and have needs according to their developmental stages. As a unique individual, children have various needs that are different from each other according to their growth and development. Child fights or physical conflicts between groups often occur in various areas, including in Tonjong. Although child brawls can be found in many places in Brebes Regency, there are several factors that contribute to this phenomenon, whether they come from social, economic, or psychological aspects of the adolescent himself. The danger of brawls is indeed very real, especially when these teenagers equip themselves with sharp weapons, of course this is a concern for the community and especially their parents, the sharp weapons used by the teenagers who fights are made by themselves, of course this becomes sad because these teenagers who are supposed to use their creativity in the academic field instead use their creativity in the wrong field.*

*This study aims to examine the role of the police in dealing with child brawls using sharp weapons in Brebes Regency and for obstacles in efforts to overcome child brawls using sharp weapons in Brebes Regency.*

*The type of research in the preparation of this thesis is library research. The method of approach to this research is normative juridical which essentially examines the law which is conceived as a norm or rule that applies in society and becomes a reference for everyone's behavior with the type of data used in this study is a combination of primary data and secondary data.*

*The results of this study show that the role of the police in tackling child brawls using sharp weapons in Brebes Regency is an integral part of efforts to create security and order in the community. Pre-emptive measures, such as legal socialization and student development in schools, as well as preventive approaches in the form of patrols in vulnerable locations, sharp weapons raids, and intensive surveillance of high-risk student groups, have shown effectiveness in preventing violent conflicts. The obstacles in tackling child brawls in Brebes Regency show that this problem is not only criminal, but also reflects social, cultural, and economic complexity. The low legal awareness among students makes them not understand the consequences of carrying sharp weapons and engaging in brawls*.

***Keywords: Brawls, Police, Sharp Weapons***

# PERSEMBAHAN

***Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh*…**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji bagi Allah ﷻ, Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan, kesabaran, serta kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad ﷺ, suri teladan sepanjang zaman. Dengan penuh ketulusan, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua Tercinta

Ayah Kasmuri dan Ibu Nurhayatun, yang doanya tak pernah putus, yang kasih sayangnya tak terbatas. Kalian adalah cahaya dalam setiap langkahku. Semoga Allah ﷻ membalas semua pengorbanan dan keikhlasan kalian dengan surga-Nya yang tertinggi.

1. Keluarga Besar

Saudara-saudaraku, terkhusus Adikku Siska Anik Artati yang selalu menjadi tempat berbagi suka dan duka, yang senantiasa memberikan dukungan dalam setiap perjuangan. Semoga Allah ﷻ selalu melimpahkan keberkahan dalam hidup kalian.

1. Kekasih Tercinta

Terimakasih kepada Chumaerotun Nisa Tasid yang telah menemani dan memberikan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga Allah ﷻ memberikan kebahagiaan atas segala sabarmu.

1. Para Dosen dan Pembimbing

Terima kasih atas bimbingan, ilmu, dan kesabaran yang telah diberikan. Semoga Allah ﷻ menjadikan setiap ilmu yang kalian ajarkan sebagai amal jariyah yang terus mengalir hingga yaumul hisab.

1. Sahabat dan Rekan Perjuangan

Kalian adalah saudara yang Allah hadirkan dalam perjalanan ini. Kebersamaan, tawa, serta perjuangan yang kita lalui adalah bagian dari kisah indah dalam menuntut ilmu. Semoga Allah ﷻ memudahkan jalan kita menuju kesuksesan dunia dan akhirat.

1. Almamater Universitas Pancasakti Tegal

Tempat yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga. Semoga menjadi institusi yang terus melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak, dan bermanfaat bagi umat.

Skripsi ini hanyalah setitik ilmu dari samudra kebijaksanaan Allah ﷻ. Semoga dapat menjadi manfaat bagi dunia akademik serta ladang pahala di sisi-Nya.

***Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh…***

# MOTTO

*“Semua pasti berlalu, jadi yang sudah pulang”*

*"Pria hanya butuh waktu untuk menempati janjinya" - Adi -*

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T. yang telahmelimpahkan kesejahteraan, kesehatan, dan hidayah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TAWURAN ANAK YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DI KABUPATEN BREBES”**. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Penyusunan skripsi ini terwujud berkat bantuan berbagai pihak baik secara moril atau materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Taufiqulloh M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bapak Dr. H. Moh. Khamim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Kepada Bapak Dr. H. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing IIyang telah berkenan memberikan bimbingan, arahan, serta sudah banyak meluangkan waktu dan pemikirannya sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan*.*
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang selama ini memberikan bekal ilmu pada penulis sehingga dapat menyelesaikan Studi Strata I Program Studi Ilmu Hukum.
8. Segenap Pegawai Administrasi / Perpustakaan di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal khususnya Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik
9. Semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan bimbingan yang telah mereka berikan menjadi amal kebajikan dan mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata kritik, saran dan masukan dari semua pihak yang memanfaatkan tulisan ini sangat penulis harapkan demi sempurnanya tugas akhir skripsi ini.

Tegal, ……………….

Penulis,

Mohammad Adi Mulya

NPM. 5120600271

# DAFTAR ISI

[PERSETUJUAN PEMBIMBING i](#_Toc188940600)

[PENGESAHAN ii](#_Toc188940601)

[PERNYATAAN iii](#_Toc188940602)

[ABSTRAK iv](#_Toc188940603)

[*ABSTRACT* v](#_Toc188940604)

[PERSEMBAHAN vi](#_Toc188940605)

[MOTTO viii](#_Toc188940606)

[KATA PENGANTAR ix](#_Toc188940607)

[DAFTAR ISI xi](#_Toc188940608)

[BAB I 1](#_Toc188940609)

[PENDAHULUAN 1](#_Toc188940610)

[A. Latar Belakang Masalah 1](#_Toc188940611)

[B. Rumusan Masalah 8](#_Toc188940612)

[C. Tujuan Penelitian 8](#_Toc188940613)

[D. Urgensi Penelitian 8](#_Toc188940614)

[E. Tinjauan Pustaka 9](#_Toc188940615)

[F. Metode Penelitian 14](#_Toc188940616)

[1. Jenis Penelitian 14](#_Toc188940617)

[2. Pendekatan Penelitian 14](#_Toc188940618)

[3. Sumber Data 15](#_Toc188940619)

[4. Metode Pengumpulan Data 17](#_Toc188940620)

[5. Metode Analisis Data 17](#_Toc188940621)

[G. Sistematika Penulisan 18](#_Toc188940622)

[BAB II 20](#_Toc188940623)

[TINJAUAN KONSEPTUAL 20](#_Toc188940624)

[A. Tinjauam Umum tentang Hukum Pidana Anak 20](#_Toc188940625)

[1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak 20](#_Toc188940626)

[2. Pelaksanaan Peradilan Pidana Anak 22](#_Toc188940627)

[B. Tinjauan Umum Tentang Anak 24](#_Toc188940628)

[1. Pengertian Anak 24](#_Toc188940629)

[2. Ruang Lingkup Anak 28](#_Toc188940630)

[3. Pengaturan Tentang Anak 31](#_Toc188940631)

[C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Tawuran 36](#_Toc188940632)

[1. Pengertian Tindak Pidana Tawuran 36](#_Toc188940633)

[2. Klasifikasi Tindak Pidana Tawuran 39](#_Toc188940634)

[D. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian 42](#_Toc188940635)

[1. Tugas Pokok Kepolisian 42](#_Toc188940636)

[2. Peranan Kepolisian Dalam Penangannan Tindak Pidana Tawuran 44](#_Toc188940637)

[BAB III 47](#_Toc188940638)

[HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 47](#_Toc188940639)

[A. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tawuran Anak Yang Menggunakan Senjata Tajam Di Kabupaten Brebes 47](#_Toc188940640)

[B. Hambatan Dalam Upaya Penanggulangan Tawuran Anak Yang Menggunakan Senjata Tajam Di Kabupaten Brebes 64](#_Toc188940641)

[BAB IV 73](#_Toc188940642)

[PENUTUP 73](#_Toc188940643)

[A. Kesimpulan 73](#_Toc188940644)

[B. Saran 75](#_Toc188940645)

[DAFTAR PUSTAKA 76](#_Toc188940646)

[DAFTAR RIWAYAT HIDUP 84](#_Toc188940647)

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Anak merupakan salah satu harta berharga yang dimiliki suatu negara untuk meneruskan cita-cita bangsa, dalam hal ini anak berperan penting dalam kemajuan suatu negara maka dari itulah negara berlomba-lomba melakukan hal yang terbaik dalam pengembangan fasilitas-fasilitas umum yang dapat mendongkrak anak agar dapat berkembang dengan baik sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang didalamnnya menjelaskan hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan dan fasilitas negara. Dari hal tersebut tentu saja dalam hal ini negara berkewajiban menjamin kualitas hidup anak sebagai penerus generasi bangsa.

Anak adalah sebagai individu yang unik dan mempunyai kebutuhan sesuai tahap perkembangannya. Sebagai individu yang unik, anak memiliki berbagai kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lain sesuai tumbuh kembang. Kebutuhan fisiologis seperti nutrisi dan cairan, aktivitas, eliminasi, tidur dan lain-lain, sedangkan kebutuhan psikologis, social dan spiritual yang akan terlihat sesuai tumbuh kembangnya.[[1]](#footnote-1) Berdasarkan hal tersebut anak memiliki kondisi psikologis yang tidak menentu hal ini

dikarenakan anak belum dalam kondisi yang matang secara psikologis yang artinya anak masih butuh pendampingan dari orang-orang terdekatnnya untuk membentuk mental untuk menjadi pribadi yang baik.

Tumbuh kembang anak banyak dipengaruhi oleh kondisi eksternal yaitu lingkungan dimana tempat dia tinggal, Ketika lingkungan tersebut mendorong anak untuk menjadi pribadi yang baik maka anak tersebut akan menjadi baik begitu pula sebaliknya, tentu saja hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri mengingat bahwa anak adalah penerus generasi bangsa. Ketidak stabilan kondisi psikologis anak mengakibatkan anak tidak bisa membedakan prilaku mana yang baik dan tidak kondisi tersebut disebut dengan kenakalan remaja. Salah satu perilaku dari kenakalan remaja yaitu Tawuran remaja merupakan perilaku menyimpang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "tawuran" dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang. Tawuran adalah suatu perbuatan anarkis yang dilakukan oleh dua kelompok dalam bentuk perkelahian masal yang terjadi di tempat umum, sehingga menimbulkan keributan dan rasa ketakutan (teror) pada warga yang ada di sekitar tempat kejadian perkara di mana tawuran itu terjadi.[[2]](#footnote-2) Tawuran merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh dua pihak atau beberapa pihak yang selalu berujung pada perkelahian, serta kebanyakan faktor pendukungnya hanyalah merupakan masalah yang ringan, misalnya tentang perempuan dan guyonan. Biasanya orang yang terlibat dalam tawuran adalah bukan orang yang mempunyai masalah dengan kelompok atau pihak tertentu. Namun, hanya satu orang saja yang sebenarnya mempunyai masalah dengan pihak lain. Dia mengajak teman-temannya untuk membantu dirinya dalam mengalahkan kelompok lawannya.[[3]](#footnote-3) Berdasarkan faktor tersebut pekelahian antar remaja ini yang mendorong terjadinya tawuran, hal ini didukung dengan ketidakstabilan emosi para remaja dan faktor dari teman mereka yang mengahasut agar terlibat dengan tawuran. Seperti pada salah satu kecamatan di Kabupaten Brebes yaitu Tonjong, adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Tonjong berada di bagian barat daya Kabupaten Brebes dan berbatasan dengan beberapa kecamatan lain, seperti Kecamatan Bumiayu di sebelah selatan, Kecamatan Wanasari di sebelah timur, serta Kecamatan Losari di sebelah utara.

Tawuran anak atau konflik fisik antar kelompok seringkali terjadi di berbagai daerah, termasuk di Tonjong. Meskipun tawuran anak dapat ditemukan di banyak tempat di Kabupaten Brebes, ada beberapa faktor yang berkontribusi pada fenomena ini, baik yang berasal dari aspek sosial, ekonomi, maupun psikologi remaja itu sendiri. Umumnya tawuran diawali oleh kenakalan biasa, akan tetapi lama-lama menjadi perilaku kejahatan kriminal karena biasanya tawuran mengakibatkan timbulnya korban. Tawuran juga memiliki keterkaitan dengan sosialisasi dalam keluarga dan kurangnya komunikasi antara orang tua dengan anak.[[4]](#footnote-4) Tawuran juga dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya yaitu: nilai-nilai yang diyakini oleh anak, kedekatan dengan peer group dan solidaritas kelompok. Studi Umaya, menemukan bahwa tawuran pelajar terjadi karena terdapat konsep kepahlawanan antar pertemanan. Terjadinya tawuran remaja karena frustrasi agresi, perilaku bermasalah dan deprivasi sosial, kondisi anomi dan kerenggangan ikatan sosial, serta budaya premanisme yaitu ketangguhan dan keberanian. Tawuran yang dilakukan pelajar cenderung disebabkan oleh masalah perebutan sesuatu ataupun harga diri kelompok yang diawali oleh tindakan membalas dari permasalahan sebelumnya.[[5]](#footnote-5) Tawuran sendiri jika dilihat dari penjelasan diatas merupakan perilaku yang menyimpang dan merugikan orang lain, serta perilaku tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya dorongan dari teman sebaya atau dari senior yang mendoktrin mereka agar melakukan perilaku menyimpang tersebut tanpa mempertimbangkan akibat dari tawuran. Berikut disajikan data terkait kejadian tawuran selama tiga tahun terakhir di Kabupaten Brebes :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data Kejadian** | **Tahun** | | |
| **2022** | **2023** | **2024** |
| Jumlah Kejadian | 6 | 11 | 8 |

Data yang disajikan di atas menunjukkan bahwa tawuran anak yang melibatkan senjata tajam seperti pisau, celurit, parang, dan golok masih menjadi masalah serius di Kabupaten Brebes. Penggunaan senjata tajam ini tidak hanya meningkatkan potensi kerusakan fisik, tetapi juga memperburuk dampak psikologis bagi korban dan pelaku. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang lebih efektif dari pihak kepolisian, lembaga pendidikan, serta masyarakat untuk mencegah terjadinya tawuran serupa di masa depan.

Salah satu kejadian tawuran yang bertempatkan di ruas jalan utama Tegal-Purwokerto, tepatnya di blok Siregol, Kecamatan Tonjong, Brebes, dimana aksi tawuran ini diposting di IG akun @insta\_bumiayu. Video berdurasi sekitar satu menit ini memperlihatkan dua kelompok pelajar yang sedang tawuran. Dalam video itu terlihat sejumlah pelajar turun dari sepeda motor dan terlibat bentrokan sambil mengacungkan senjata tajam mirip celurit berukuran panjang. Aksi brutal kalangan pelajar ini membuat resah warga sekitar dan pengguna jalan.

Modus aksi tawuran yang dilakukan dua kelompok remaja dari salah satu SMK di Bumiayu dan SMK di Sirampog. Pihaknya telah melakukan upaya pendekatan ke masing-masing sekolah untuk penanganan dan pencegahan. Dipicu aksi saling tantang melalui media sosial dan kedua belah pihak menyepakati lokasi aksi tawuran. Dengan demikian maraknya dalam beberapa kesempatan Kapolres Brebes, AKBP Achmad Oka Mahendra juga memberikan motivasi kepada seluruh siswa agar belajar dengan benar karna pelajar adalah penerus dan harapan bangsa di masa depan. Disampaikan Kapolres para pelajar juga miliki tangung jawab untuk membawa Brebes menjadi tempat yang lebih baik. Yaitu dengan belajar yang baik, mentaati aturan, menghormati guru dan sesama pelajar untuk membawa estafet kepemimpinan dimasa depan. Adanya fenomena dibeberapa wilayah masih dijumpai kenakalan remaja, Kapolres juga mengimbau para siswa siswi untuk tidak terlibat tindakan kriminal seperti perkelahian antar pelajar (tawuran), balap liar, perang sarung serta tindakan bullying yang saat ini banyak kerap terjadi.[[6]](#footnote-6)

Bahaya tawuran memanglah sangat nyata terlebih lagi ketika para remaja ini membekali diri mereka dengan senjata tajam, tentu saja hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat dan juga terutama orang tua mereka, bisanya senjata tajam yang digunakan para remaja yang tawuran dibuat oleh mereka sendiri tentu saja hal ini menjadi miris dikarenakan mereka para remaja ini yang seharusnya menggunakan kreatifitasnya dibidang akademik malah menggunakan kreatifitasnya di bidang yang salah. Dalam penanganan Tindakan tawuran remaja yang menggunakan senjata tajam ini melibatkan pihak kepolisian sebagai garda terdepan dalam menanggulangi Tindakan tersebut.

Peran kepolisian dalam menangani tawuran remaja merupakan aspek krusial dalam menjaga stabilitas dan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Kehadiran lembaga kepolisian tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga melibatkan upaya pencegahan, intervensi, dan pembentukan kolaborasi yang efektif dengan berbagai pihak terkait. Lembaga kepolisian merupakan bagian dari sistem pemerintahan negara, yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam menjaga ketertiban dan penegakan hukum yang sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa :

“*Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat*”.

Dalam mengembangkan konsep ini, perlu diperinci bagaimana kepolisian dapat memberikan dampak positif dalam menangani masalah tawuran remaja.[[7]](#footnote-7) Peran polisi tidak hanya sebatas dalam menangani dan mengamankan tawuaran antar remaja yang menggunakan senjata tajam, namun polisi juga berperan dalam penanggulangan mengenai tawuran remaja tentu saja hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pihak kepolisian. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang “PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TAWURAN ANAK YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DI KABUPATEN BREBES”

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan tawuran anak yang menggunakan senjata tajam di Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana hambatan dalam upaya penanggulangan tawuran anak yang menggunakan senjata tajam di Kabupaten Brebes?

## Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji peran kepolisian dalam penanggulangan tawuran anak yang menggunakan senjata tajam di Kabupaten Brebes.
2. Untuk hambatan dalam upaya penanggulangan tawuran anak yang menggunakan senjata tajam di Kabupaten Brebes.

## Urgensi Penelitian

Penelitian mengenai Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tawuran Anak Yang Menggunakan Senjata Tajam Di Kabupaten Brebes terdapat beberapa faktor yang menjadikan penelitian ini penting yaitu sebagai berikut:

* 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi praktisi seperti Advokat, pihak Kepolisian dan Masyarakat. Dengan memahami penangulangan yang diperankan oleh pihak kepolisian dalam pencegahan tawuran remaja, serta dapat mengidentifikasi motif remaja yang menggunakan senjata tajam dan terlibat dengan tawuran agar mencapai kepatuhan hukum dan praktik-praktik yang akan dilakukan.
  2. Peneliti ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang proses pihak kepolisian dalam Penanggulangan Tawuran Remaja Yang Menggunakan Senjata Tajam dengan memahami bagaimana kerangka hukum positif Indonesia serta motif dari para remaja tersebut mempengaruhi praktik proses penyelidikan yang dilakukan kepolisian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori hukum pidana, teori hukum anak, dan teori lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
  3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur akademis tentang tentang teori hukum pidana, teori hukum anak, dan teori lainnya yang berkaitan dengan penelitian serta mekanisme pihak kepolisian dalam menanggulangi Tawuran Remaja Yang Menggunakan Senjata Tajam.

## Tinjauan Pustaka

Pengambilan penelitian dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tawuran Anak Yang Menggunakan Senjata Tajam Di Kabupaten Brebes” merupakan suatu hasil analisis dari peneliti dengan meninjau penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi referensi untuk mengkaji kembali dengan pengambilan persamaan dari tema dan objek penelitian dengan adanya perbedaan pada penelitian ini seperti pada penelitiaan berikut:

1. Gebby Sintia Irawati, Wahab Aznul Hidaya, Masrifatun Mahmudah, dengan penelitiannya pada Jurnal Judge Universitas Muhammadiyah Sorong, Volume 5, Nomor 2, 2024 dengan judul Penelitian “Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Tawuran Yang Dilakukan Oleh Anak”.[[8]](#footnote-8) Penelitian Gebby Sintia Irawati, Wahab Aznul Hidaya, Masrifatun Mahmudah, menjelaskan bahwa Hasil penelitian menunjukkan kasus tersebut ditemukan oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana perkelahian oleh anak-anak di Kota Sorong serta hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menangani kejadian tawuran di Kota Sorong adalah kurangnya ketersediaan Rumah Sakit untuk melakukan visum bagi korban dan kurangnya komunikasi kepada para pelajar

Berdasarkan Gebby Sintia Irawati, Wahab Aznul Hidaya, Masrifatun Mahmudah, terdapat suatu perbedaan pembahasan dengan peneliti yaitu mengenai Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Tawuran yang disoroti berbeda dengan yang akan diteliti oleh peniliti Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tawuran Remaja Yang Menggunakan Senjata Tajam serta penempatan *locus* yang berbeda

1. Unga dengan penelitiannya pada Skripsi Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020 dengan judul penelitian “Peranan Kepolisian Sebagai Criminal Justice System Dalam Menanggulangi Tawuran Antar Pelajar (Studi Pada Madrasah Aliyah Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palopo)”.[[9]](#footnote-9) Penelitan Unga Hasil dari penelitian ini bahwa kepolisian berperan dalam mengatasi tawuran antar pelajar di Kota Palopo yaitu bekerjasama dengan dinas terkait, dan pihak sekolah untuk memberikan langkah-langkah pembinaan kepada para pelaku tawuran. Tawuran Antar Pelajar disebabkan beberapa faktor antara lain; faktor lingkungan, faktor pendidikan atau sekolah. Faktor penyebab terjadinya tawuran antar pelajar biasanya karena adanya rasa ketersinggunngan, dendam, adanya pihak ketiga dan kurangnya miskomunikasi antar dua sekolah yang berbeda. Upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seperti tawuran antar pelajar yaitu: dengan menggunakan Metode Pre-emptif yaitu usaha atau upaya-upaya pencgahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, yang dilakukan kepolisian, Agar masyarakat dapat mentaati norma-norama yang berlaku walaupun pelajar masih dikategorikan sebagai anak dibawah umur. Metode Preventif yaitu upaya dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan.

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat suatu perbedaan pembahasan yang akan diteliti yaitu terdapat pada *locus* yang akan dibahas serta mengenai subjek hukumnya lebih condong dalam membahas mengenai remaja yang menggunakan senjata tajam yang digunakan untuk tawuran.

1. Faisal Andico Syach Putra dengan penelitiannya pada Skripsi Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022 dengan judul penelitian “Peranan Kepolisian Dalam Peneyelesaian Tawuran Antar Pelajar (Studi Kasus di Polsek Margorejo Kabupaten Pati) ”.[[10]](#footnote-10) Penelitan Faisal Andico Syach Putra menjelaskan Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan peranan Kepolisian dalam penyelesaian tawuran antar pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Margorejo Kabupaten Pati yaitu mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah, menempatakan personil kepolisian atau pengamanan untuk mencegah terjadi adanya tawuran, berkoordinasi oleh pihak sekolah atau guru-guru, memberikan pemahaman kepada orang Tua agar tidak membiarkan anaknya berkeliaran dan untuk Tersangka (pelaku anak) dalam penanganannya di pangilkan Linmas dari Bapas (Bimbingan Masyarakat) untuk meringankan sanksi terhadap pelaku anak. Peranan Kepolisian dalam penyelesaian tawuran antar pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektro Margorejo Kabupaten Pati juga menerapkan 3 Metode penanggulanagan yaitu metode Pre-emptif, Pre-ventif dan juga Represif. Kendala Kepolisian dalam penyelesaian tawuran antar pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Margorejo Kabupaten Pati yaitu alat bukti yang belum mencukupi dan tersangka melarikan diri. Sedangkan solusi untuk mengatasi kendala-kendala dalam penyelesaian tawuran antar pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Margorejo Kabupaten Pati yaitu dengan melakukan penyidikan lebih lanjut dan lebih teliti lagi untuk mencari pelaku, bisa dengan cara membagi kelompok agar kerjanya lebih efektif dan efisien dan juga bisa lebih fokus. Sedangkan solusi untuk mengatasi pelaku yang melarikan diri adalah dengan cara bekerja sama dengan seluruh kepolisian republik Indonesia untuk menangkap dan memeriksa tersangka sesuai dengan Pasal 119 KUHAP.

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat suatu persamaan yaitu mengenai subjek hukum yang dibahas, lalu terdapat perbedaan yang ditulis oleh peneliti yaitu mengenai pembahasan metode yang digunakan dalam penaggulangan pihak kepolisian terhadap tawuran remaja yang menggunakan senjata tajam serta *locus* dari permasalahan tersebut.

## Metode Penelitian

### Jenis Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Merupakan penelitian melalui perpustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menala’ah dan meneliti berbagai literatur-literatur berbentuk buku-buku serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data primer untuk digunakan sebagai landasan dari penelitian ini yang kemudian didukung dengan menggunakan data-data lain yang bersumber dari data sekunder, yang berkaitan dengan tema dari penelitian ini. Dilihat dari bidang kajiannya, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum.[[11]](#footnote-11) Jenis penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara melakukan observasi secara mendalam melalui Penelususran pustaka dengan memanfaatkan sumber-sumber berupa jurnal, buku, kamus, dokumen, majalah dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang telah menjadi kekhawatiran banyak orang.

### Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini mengunakan Metode Penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Para penulis sepakat bahwa penelitian hukum normatif yaitu meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder. Penelitian hukum normatif juga disebut dengan penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoretis/dogmatis.[[12]](#footnote-12) Pendekatan penelitian dilakukan dengan cara menganalisis setiap peristiwa dan peran kepolisian dalam penanggulangan tawuran remaja yang menggunakan senjata tajam

### Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Berkaitan dengan jenis penelitian yang dilakukan penulis yang merupakan penelitian yuridis normatif, maka jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penggabungan antara data primer dan data sekunder. Berikut beberapa jenis sumber data penelitian yang umum dijadikan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan penelitian:

1. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengikat secara hukum dan membahas pokok-pokok studi ini, seperti:
   * 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
     2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
     3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
     4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar para hukum.[[13]](#footnote-13) Hasil Penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur lain berupa buku-buku, peraturan-peraturan, hasil penelitian serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan peran kepolisian dalam menanggulangi tawuran remaja yang menggunakan senjata tajam guna memperkaya dan melengkapi sumber data primer.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.[[14]](#footnote-14) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang digunakan sebagai petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya yaitu seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan kamus hukum. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini digunakan sebagai referensi untuk dapat merumuskan dan menganalisa mengenai penelitian yang akan diteliti.

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk memperoleh data yang lengkap serta komprehensif dalam penelitian ini, maka data yang diperoleh dari data sekunder teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan studi kepustakaan atau melakukan studi dokumen yang merupakan sumber bahan hukum primer dan sekunder serta bahan sumber hukum tersier yang ditemukan pada pengamatan secara langsung, laboratorium hukum, jurnal hukum dan internet. Selanjutnya dilakukan Analisa dan juga investigasi terhadap dokumen-dokumen atau bahan-bahan hukum yang kemudian dianalisa dan dilakukan pembahasan sehingga data tersebut menjadi sistematis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif yaitu menggabungkan antara penelitian deskriptif dan juga kualitatif, Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Sesuai dengan namanya, jenis penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti.[[15]](#footnote-15) Jenis penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.[[16]](#footnote-16) Analisis penelitian ini bersifat deskripsi kualitatif, menggunakan data yang telah disusun menjadi kalimat dan dilakukan secara sistematis. berdasarkan konsep hukum, prinsip hukum, norma hukum, dan ketentuan hukum positif. Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan cara mengurutkan data pada suatu pola dan kategori yang diperoleh melalui pendekatan kepustakaan atau melakukan studi dokumen Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu hanya akan menggambarkan saja dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Sedangkan data yang sudah dianalisis akan disajikan secara kualitatif.

## Sistematika Penulisan

**Bab I Pendahuluan**, Bab ini merupakan awal penulisan dari penelitian yang memberikan gambaran awal tentang yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Rencana Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian yang merupakan gambaran awal dari penelitian pada bab ini.

**Bab II Tinjauan Konseptual**, Bab ini akan memuat kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti ini meliputi Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tinjauan Umum tentang Anak, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Tawuran, Tinjauan Umum tentang Hukum Kepolisian.

**Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**, Bab ini penulis akan menguraikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang ada yaitu tentang (1) Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan tawuran anak yang menggunakan senjata tajam di Kabupaten Brebes. (2) Bagaimana hambatan dalam upaya penanggulangan tawuran anak yang menggunakan senjata tajam di Kabupaten Brebes.

**Bab IV Penutup**, Bab ini penulis akan memberikan kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dan diuraikan secara deskriptif menjawab inti pada permasalahan pada penelitian ini, serta Bab ini memuat simpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan asumsi-asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya, dan saran.

# BAB II

# TINJAUAN KONSEPTUAL

## Tinjauam Umum tentang Hukum Pidana Anak

### Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Hukum pidana masih merupakan salah satu pilar hukum yang terus berkembang di Indonesia. Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh“ pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.[[17]](#footnote-17) Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem peradilan pidana khusus mengenai anak. Maka untuk memahaminya dapat ditelusuri dengan terlebih dahulu mengetahui pengertian Sistem Peradilan Pidana. Istilah Sistem Peradilan Pidana sendiri berarti “suatu mekanisme kerja dalam pencegahan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem dasar”. Sedangkan Sistem Peradilan Pidana adalah suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai

sarana utamanya, baik hukum materil, formil maupun hukum pelaksana.[[18]](#footnote-18)

Prinsip perlindungan anak merupakanprinsip tanpa kekerasan yang menitikberatkan pada kepentingan anak dan hak atas perlindungan kehidupan, kesejahteraan, tumbuh kembang anak, termasuk anak yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, ketika terdapat anak yang berkonflik dengan hukum, maka perlu adanya sistem peradilan pidana anak yang mempunyai mekanisme untuk menangani perkara anak di luar sistem peradilan pidana. Dengan lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan PidanaAnak Nomor 11 Tahun 2012, munculah gagasan mengenai penyelesaian perkara anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum atau dikenal dengan istilah manufaktur atau proses pembuatan.[[19]](#footnote-19)

Sistem peradilan pidana anak digunakan oleh penegak hukum untuk memutuskan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum. Kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama dalam pemidanaan anak. Namun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peradilan Pidana Anak merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Hal tersebut dilakukan bertujuan sebagai peradilan khusus, Peradilan Pidana Anak berada di bawah ruang lingkup Peradilan Umum.[[20]](#footnote-20)

### Pelaksanaan Peradilan Pidana Anak

Pnggunaan istilah Sistem Peradilan Anak mengandung unsur “sistem peradilan pidana” dan “anak”. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” harus disertakan. Hal ini untuk membedakannya dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana bagi anak.[[21]](#footnote-21) Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditentukan bahwa anak yang lahir memiliki hak untuk hidup dan berkembang, seorang anak juga harus dilindungi dari kekerasan baik secara verbal ataupun fisik, hal ini sesuai dengan aturan pokok Negara yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[[22]](#footnote-22)

Sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau law enforcement, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainly*). Dilain pihak, apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan social defense yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan kegunaan (*expediency*). Tujuan akhir dari sistem peradilan pidana dalam jangka panjang yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial dalam jangka pendek yakni mengurangi terjadinya kejahatan dan residivisme jika tujuan ini tidak tercapai maka dapat dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara wajar.[[23]](#footnote-23)

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak lahir dengan norma yang lebih menginkorporasikan prinsip dan nilai dalam Konvensi Hak Anak (KHA) serta instrumen lain dalam perkembangan pemikiran mengenai HAM, khususnya yang berkenaan dengan hak anak. Yang paling istimewa, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak berani memasukkan paradigma penegakan hukum dengan pendekatan keadilan baru yang mau tidak mau membutuhkan komitmen penuh para penegak hukumnya untuk benar-benar terlibat secara aktif dalam menyelesaikan masalah anak. UU SPPA juga menggunakan sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) ketika KUHP baru menerapkan sistem yang sama namun hingga sekarang masih dalam bentuk rancangan, sehingga Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah beberapa langkah jauh di depan. Bentuk-bentuk sanksi pidana dan tindakan yang digunakan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mencerminkan tujuan pemidanaan yang lebih mengikuti pembaharuan hukum pidana (penal reform) dengan menganut aliran neo klasik, mengakui asas- asas atau keadaan yang meringankan pemidanaan, mendasarkan pada keadaan objektif dan mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.[[24]](#footnote-24)

## Tinjauan Umum Tentang Anak

### Pengertian Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Untuk itu orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Secara sekilas, terutama bagi orang yang hidup berkecukupan, anak-anak adalah mereka yang jauh dari masalah. Dunia mereka adalah dunia bermain dan bersukacita dan belum perlu memikirkan tanggung jawab seperti manusia dewasa. Namun jika mau melihat sedikit lebih dalam saja, maka dalam “dunia kecil" mereka itu, segudang permasalahan terkumpul. Anak-anak terancam oleh eksploitasi, peperangan, kelaparan dan kekerasan, baik kekerasan fisik, psikologis maupun structural.[[25]](#footnote-25)

Anak sebagai penerus bangsa memiliki hakasasi manusia yang melekat pada diri merekaselama hidupnya dan sudah di akui dunia yangterlihat dengan terbentuknya Konvensi Hak-Hak Anak oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Pertumbuhan fisik serta perkembanganmental anaksudah seharusnya diberikan perhatian khusus sertaperlindungan khusus terutama negara harus turutserta dalam peran ini dan juga keluarga sebagai lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh anak.[[26]](#footnote-26) Pengertian anak menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.[[27]](#footnote-27)

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.[[28]](#footnote-28) Anak merupakan subyek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda yang berperan sangat strategis bagi kelangsungan suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa”.[[29]](#footnote-29) Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, terdiri atas:

1. Anak yang berkonfiik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahum, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3).
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4).
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (Pasal I angka 5).[[30]](#footnote-30)

Dalam hukum di Indonesia terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini sebagai akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang ada mengatur secara tersendiri mengenai pengertian anak sesuai dengan kepentingan spesifik obyek yang diaturnya. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum itu sendiri atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum, sehingga undang-undang sistem peradilan anak memberikan perlakuan khusus terhadap anak, dengan memberikan pendampingan oleh pembimbing kemasyarakatan dalam menjalani proses peradilan pidana anak karena anak adalah seseorang yang belum cakap hukum.[[31]](#footnote-31)

### Ruang Lingkup Anak

Batas usia anak atau orang yang belum dewasa dengan orang yang sudah dianggap dewasa memiliki ukuran usia yang berbeda. Ini didasari pada perbedaan keadaan dan situasi sertatujuan dari masing-masing undang-undang yang berlaku. Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, seorang anak dikatakan sudah dewasa jika ia sudah menginjak umur 17 tahun. Sehingga jika dia sudah mencapai usia tersebut, dia secara legal berdasarkan undang-undangmemiliki hak memilih dalam pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Batasan umur dikatakan dewasa adalah saat anak sudah berusia 18 tahun. Menurut KUHP pasal 45 kaitannya dengan penuntutan pidana, anak belum bisa dijatuhi tuntutan sebelum umur 16 tahun. Akan tetapi hakim dapat menentukan untuk supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tua, wali, atau yang memeliharanya, tanpa dikenai pidana apapun. Hanya saja berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012, seorang anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan Tindakan pidana disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.[[32]](#footnote-32)

Seseorang pada masa usia anak adalah usia dimana banyak sekali terjadi hal-hal yang sangat kompleks yang salah satunya adalah perbuatan kenakalan yang menjurus kepada perbuatan tindak pidana. Dalam hal ini seorang anak sedang mencari jati diri yang ditandai dengan perbuatan-perbuatan tertentu untuk menentukan sendiri siapa diri mereka yang sesungguhnya, bagaimana sikap baik lahir maupun batin mereka, apa yang menjadi tumpuan mereka dan fungsi mereka dalam konteks kehidupan bermasyarakat.[[33]](#footnote-33) Faktor-faktor utama pembentukan nilai seorang anak remaja diantaranya keluarga, agama, sekolah, dan lingkungan. Selalu terdapat dampak ganda yang timbul oleh lingkungan terhadap tatanilai anak remaja. Sebagai contohnya, pergaulan akan berdampak positif karena membawa nilai-nilai kebaikan jika berada dalam koridor yangbenar. Namun, pergaulan juga sering menyeret para remaja kedalam perbuatan melanggar hukum, melakukan perbuatan asusila, amoral, bahkan tindakan kejahatan. Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh remaja dalam arti kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yangbelum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan disadari oleh anak itu sendiri bahwaperbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman (pidana).[[34]](#footnote-34) Apabila anak melanggar hukum maka, anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun, meski harus untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, anak tersebut harus dilindungi. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilaryakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu samalain sebagai penyelenggara perlindungan anak.[[35]](#footnote-35)

Anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*).[[36]](#footnote-36) Anak sebagai pelaku kejahatan lebih mudah dikendalikan dan diremediasi apabila dibandingkan dengan orang dewasa sebagai pelaku kejahatan. Hal ini dikarenakan tingkat perkembangan anak berbeda dengan karakteristik dan kepribadian anak. Bayi, remaja, dewasa dan orang tua berbeda secara psikis dan fisik.[[37]](#footnote-37)

### Pengaturan Tentang Anak

Salah satu instrumen digunakan dalam perlindungan pada anak adalah hukum, dimana perlindungan hukum bagi seorang anak diartikan sebagai suatu upaya perlindungan hukum pada berbagai kekerasan dan hak dari anak serta berbagai dari upaya yang saling berhubungan dengan suatu kesejahteraan anak, ada beberapa konsep juga pengertian telah dikemukakan tentang perlindungan anak. Perlindungan anak menurut Gosita merupakan suatu usaha membuat kondisi dan situasi yang memungkinkan dari pelaksanaan hak juga kewajiban anak yang secara manusiawi. Setiap hak dari anak harus dijunjung dengan tinggi untuk pencapaian tujuan yakni lahirnya generasi muda sehat untuk kelangsungan dari kehidupan berbangsa dan bernegara.[[38]](#footnote-38) Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas dan berakhlak mulia dan sejahterah. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak antara lain disebabkan oleh faktor dari luar diri anak tersebut.[[39]](#footnote-39)

Perlindungan anak secara spesifik juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Kemunculan UUPA ini merupakan harapan baru bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun anak pelaku kejahatan untuk mendapatkan perlindungan secara adil.[[40]](#footnote-40) Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa:

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
3. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
4. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
5. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
6. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
7. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
8. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
9. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.[[41]](#footnote-41)
10. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
11. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar Lembaga.
12. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
13. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun social.
14. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.[[42]](#footnote-42)

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu:

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan.
3. Perlindungan kesejahteraan anak dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial.
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kernerdekaan.
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan, dan sebagainya).
6. Perlindungan terhadap anak-anak   
   jalanan.
7. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik   
   bersenjata.
8. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.[[43]](#footnote-43)

## Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Tawuran

### Pengertian Tindak Pidana Tawuran

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu *strafbaar feit*, yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Dan untuk kata *feit*, diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan pembuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.[[44]](#footnote-44) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tawuran antar pelajar berasal dari kata “tawur” dan “pelajar”. Tawuran adalah bentuk kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang lain, yang sering kali menyebabkan kerusakan properti, luka berat, atau bahkankematian. Tindakan ini merupakan perilaku yang sangat tercela, baik dilakukan oleh individu maupun kelompok. Oleh karena itu, tawuran bisa dikategorikan sebagai interaksi manusia yang sangat merugikan, karena kedua belah pihak berusaha saling melukai secara fisik, baik dengan menggunakan alat bantu maupun tanpa alat.[[45]](#footnote-45) Tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukanoleh suatu kelompok tertentu. Di zaman yang modern ini tawuran seringkali dianggap oleh suatu kalangan atau kelompok tertentu sebagai sesuatu yangkeren. Bahkan tawuran tidak hanya terjadi di kalangan orang dewasa, melainkan seringkali terjadi dikalangan pelajar. Hal ini tentu merupakan masalah yang cukup serius mengingat tugasutama dari pelajar adalah menimba ilmu dan belajar.[[46]](#footnote-46)

Dianggap sebagai bagian dari kenakalan karena perbuatannya melanggar ketertiban umum, yang dapat mengakibatkan kerugian, bahaya, serta kerusakan. Namun, tindakan tawuran tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tergantung pada dampak yang ditimbulkan. Jika tawuran mengakibatkan kekerasan terhadap orang atau barang, pelaku dapat dijerat Pasal 170 KUHP tentang perkelahian massal, yang sering dianggap sebagai pengeroyokan. Meski demikian, penerapan pasal tersebut memerlukan terpenuhinya semua unsur yang tercantum. Selain itu, pelaku tawuran juga dapat dikenakan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila unsur-unsurnya terpenuhi.[[47]](#footnote-47) Penerapan Pasal 170 KUHP kepada anak yang berhadapan dengan hukum, Penyidik Kepolisiantidak serta merta menerapkan pasal tersebut dikarenakan ancaman pidananya memberatkan pelaku. Penyidik berpandangan bahwa peranan pelaku sangat berperan penting dalam menerapkan suatu aturan hukum terhadap apa yang di langgarnya. Jika anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku dalam melakukan tindak pidana tawurankelompok yang tidak mengakibatkan penganiayaan berat serta hilangnya nyawa seseorang atas tindakannya tersebut, penyidik menerapkan diversi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, dalam hal tersebut penyidik lebih mementingkan masa depan anak dan tujuan diversi itu sendiri.[[48]](#footnote-48)

Tawuran berpotensi untuk menimbulkan dampak serius terhadap masyarakat dan individu yang terlibat dalam aksi tersebut. dampak fisiknya mencakup cedera yang signifikan, bahkan berpotensi mengakibatkan kematian, baik pada pihak pelaku maupun korban. Selainitu, insiden tawuran juga mampu menciptakan rasa ketakutan dan ketegangan di antara penduduk setempat, serta bisa merusak citra lingkungan tempat terjadinya aksi tawuran tersebut. Menangani masalah tawuran harus menuntut kerja sama lintas sektor yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan keluarga. Tindakan yang dapat dilakukan untuk menghentikan peningkatan aksi tawuran meliputi pendidikan yang memberikan pemahaman tentang akibat dari tindakan kekerasan, promosi dialog damai, dan upayapembinaan remaja.[[49]](#footnote-49)

### Klasifikasi Tindak Pidana Tawuran

Tawuran seringkali melibatkan remaja atau anak muda, dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar, baik secara fisik maupun psikologis. Selain itu, tawuran juga dapat menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat dikarenakan banyaknya kejadian tawuran biasa nya memakai senjata tajam yang dapat melukai orang lain bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain, dan dapat mengganggu ketertiban dan keamanan dalam bermasyaratkatan.[[50]](#footnote-50) Dari segi psikologis, pertarungan yang melibatkan pelajar remaja tergolong salah satu bentuk kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). Kenakalan remaja dalam konteks pertarungan dapat dibagi menjadi 2 jenis delinkuensi, yaitu situasional dan sistematis. Dalam delinkuensi situasional, pertarungan terjadi karena adanya situasi yang mendorong mereka untuk terlibat dalam pertarungan. Dorongan ini muncul akibat kebutuhan untuk segera menyelesaikan masalah. Sementara dalam delikuensisistematis, remaja yang terlibat perkelahian merupakan bagian dari suatu organisasi atau geng tertentu. Ini berisi aturan, norma, dan kebiasaan yang harus diikuti oleh anggota, termasuk partisipasi dalam pertempuran. Anggota merasa bangga ketika mampu memenuhi harapan kelompok.[[51]](#footnote-51)

Mustofa menyatakan bahwa tawuran dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Perkelahian antara dua kelompok siswa dari sekolah saingan yang memiliki sejarah permusuhan panjang dan dianggap tradisional.
2. Perkelahian terjadi antara dua kelompok pelajar pecah di antara dua kelompok tersebut. Tawuran pelajar yang melibatkan dua kelompok berbeda, di mana satu kelompok berasal dari sebuah sekolah, sedangkan kelompok lainnya berasal dari sebuah perguruan yang mencakup beberapa jenis sekolah di dalamnya.
3. Perkelahian pelajar yang tidak disengaja (pada saat-saat tertentu) siswaantara dua kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda, baikpertengkaran darisini biasanya disebabkan oleh keadaan tertentu. Misalnya misalnya sekelompok pelajar di dalam bus secara tidak sengaja bertabrakan dengan sekelompok pelajar lain, lalu mereka mulai saling menghina hingga terjadi perkelahian.[[52]](#footnote-52)

Kurangnya pemahaman tentang hukum memiliki konsekuensi negatif bagi pengguna hukum sendiri, terutama bagi masyarakat umum. Contohnya, tawuran antara pelajar atau siswa dapat mengancam keamanan dan kenyamanan masyarakat secara luas, menunjukkan bahwa para siswa memiliki pengetahuan yang minim tentang ancaman hukuman atas perbuatan mereka dan dampaknya terhadap masa depan pribadi mereka. Tawuran antar siswa, terutama di tingkat SMA/K, sering terjadi di tengah masyarakat. Para siswa yang berasal dari kelompok terpelajar seharusnya menyadari konsekuensi negatif dari tindakan tersebut. Meskipun dalam kurikulum pendidikan SMA/K telah diajarkan mengenai hukum dan moral, contohnya melalui mata pelajaran Agama, Pancasila, dan Kewarganegaraan, namun siswa masih terlibat dalam tawuran yang bisa berakibat pada pelanggaran hukum pidana.[[53]](#footnote-53)

Maraknya tindak pidana terutama disebabkan keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas dan tidak dapat mengendalikan diri untuk menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma yang wajar, sehingga terdapat dorongan yang kuat untuk memenuhi keinginan dengan menghalalkan berbagai cara, termasuk dengan melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang perlu mendapat perhatian adalah tindak pidana membawa senjata penikam atau sering disingkat dengan senjata tajam. Tanggung jawab pidana berkaitan dengan persyaratan bahwa seorang kriminal dapat dihukum atau tidak dihukum karena melakukan tindak pidana atau melanggar larangan untuk bertindak dalam hukum pidana.[[54]](#footnote-54)

## Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

### Tugas Pokok Kepolisian

Istilah polisi berasal dari kata politea yang dalam bahasa Yunani memiliki arti atau pada mulanya meliputi semua hal mengenai kenegaraan, semua usaha negara, tidak terkecuali urusan keagamaan. Pada saat itu negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan *Polis*. Jadi pada zaman itu arti polisi demikian luasnya bahkan meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga didalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya, termasuk dalam urusan pemerintahan.[[55]](#footnote-55) Pengertian kepolisian terdapat dalam Undang-Undang di Indonesia. Undang-undang yang membahas tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam Pasal 1 ayat (1). Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“*Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*”.[[56]](#footnote-56)

Polri secara universal mempunyai tugas yang sama yaitu sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta aparat penegak hukum, walaupun dalam praktek di masing-masing negara mempunyai pola dan prosedur kerja yang berbeda. Dengan berkembangnya peradaban manusia dan berkembangnya pola kejahatan maka tugas Polisi semakin berat dan kompleks.[[57]](#footnote-57)

Polisi dalam melaksanakan tugas pokok, polisi memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu:

1. Fungsi Preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa polisi itu berkewajiban melindungi Negara beserta lembagalembaganya, ketertiban dan ketatanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jelas mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketenteraman umum.
2. Fungsi represif atau pengendalian, yang berarti bahwa polisi itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkapi pelaku-pelakunya dan menyerahkannya kepada penyidikan (yustisi) untuk penghukuman.[[58]](#footnote-58)

### Peranan Kepolisian Dalam Penangannan Tindak Pidana Tawuran

Peranan Kepolisian berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselanggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat.[[59]](#footnote-59)

Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sangat hati–hati supaya tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Usia remaja yang tergolong masih perlu mendapatkan pembinaan juga perlu mendapatkan Pendidikan yang layak dari negara. Sebagaimana tercantum dalam “Pasal 28B ayat 2 bahwa masing -masing anak berhak atas kelangsungan hidup, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi”. Remaja adalah warga negara yang berhak memperoleh perlindungan hak konstitusionalnya, termasuk dalammendapatkan jaminan hukum yang melindungi kebutuhan fisik dan psikologisnya.[[60]](#footnote-60) Aparat kepolisian dalam menindak para pelaku tawuran pelajar sangatlah penting. Aparat kepolisian yang mempunyai peran sebagai kontrol sosial harus bertindak dan bergerak cepat dalam menangani peristiwa tawuran pelajar sebelum menimbulkan kerugian yang besar baik materiil maupun formil. Peranan kepolisian tidaklah hanya sebagai pihak yang menghentikan tawuran pada saat terjadinya suatu tawuran, tetapi aparat kepolisian juga harus bertindak sebagai penegak keadilan dan penegak hukum terhadap para pelaku tawuran pelajar yang tertangkap. Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaialat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum". Peran aparat kepolisian tidak hanya sebatas di lapangan saja dalam menangani dan mengamankan tawuran pelajar. Aparat kepolisian juga berperan dalam penangkapan dan penyidikan kepada pelaku tawuran pelajar. Penangkapan dilakukan di tempat kejadian kepada pelaku yang dianggap sebagai provokator. Penyidikan dilakukan untuk mengetahui motif tawuran, para pelaku dan kronologi tawuran pelajar yang dilakukan.[[61]](#footnote-61)

Kepolisian juga telah melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi kepada siswa tentang dampak negatif tawuran dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencegahnya. Menempatkan petugas di area yang rentan terhadap tawuran dan melakukan pemeriksaan terhadap siswa yang membawa senjata tajam merupakan dua cara lain yang dapat dilakukan kepolisian untuk mencegah tawuran. Bersama dengan organisasi-organisasi tersebut, kepolisian juga kerap diundang untuk menjadi narasumber dalam seminar atau pertemuan khusus yang diadakan oleh Dinas atau Pemerintah Daerah (Pemda). Kegiatan tersebut dilakukan untuk menyikapi permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), yaitu anak yang menjadi pelaku, korban, atau saksi, seperti tawuran antar sekolah. Oleh karena itu, di sinilah kepolisian mengomunikasikan tantangan, harapan, dan solusinya agar dapat meminimalisir bahkan mecegah aksi tawuran pelajar.[[62]](#footnote-62)

1. Ferasinta, *et.al*, *Konsep Dasar Keperawatan Anak*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021:3. [↑](#footnote-ref-1)
2. Asti Musman, *Sebuah Panduan Untuk Menjadi Diri Sendiri*, Yogayakarta: Anak Hebat Indonesia, 2021:154. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid* [↑](#footnote-ref-3)
4. Siti Mas’udah, *Sosiologi Keluarga : Konsep, Teori, dan Permasalahan Keluarga*, Jakarta: Kencana, 2023:190. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-5)
6. Humas Polres Brebes, “Pelajar SMA 3 Brebes Diminta Tak Terlibat Tawuran dan Narkoba” diakses melalui https://mediahub.polri.go.id/image/detail/94682-motivasi-pelajar-kapolres-brebes-jadi-irup-di-sma-3-brebes-police-goes-to-school-kapolres-jadi-irup-di-sma-3-brebes-ini-yang-disampaikan, pada 10 Desember 2024, pukul 20:20 WIB. [↑](#footnote-ref-6)
7. Aditiya Prasetiyo Aripin, Endang Larasati Setianingsih, Dyah Lituhayu, “Kualitas Pelayanan Kepolisian Resor Tegal Dalam Penanganan Tawuran Pelajar Di Kabupaten Tegal”. *Journal of Public Policy and Management Review,* 13 (4), 2024:2. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/47441/32192. [↑](#footnote-ref-7)
8. Gebby Sintia Irawati, Wahab Aznul Hidaya, Masrifatun Mahmudah “Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Tawuran Yang Dilakukan Oleh Anak”. *Jurnal Judge,* 5 (2), 2024. https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/748/477. [↑](#footnote-ref-8)
9. Unga,” Peranan Kepolisian Sebagai Criminal Justice System Dalam Menanggulangi Tawuran Antar Pelajar (Studi Pada Madrasah Aliyah Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palopo)” *Skiripsi Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020* http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3370/1/UNGA.pdf. [↑](#footnote-ref-9)
10. Faisal Andico Syach Putra, “Peranan Kepolisian Dalam Peneyelesaian Tawuran Antar Pelajar (Studi Kasus di Polsek Margorejo Kabupaten Pati)” *Skripsi Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022* https://repository.unissula.ac.id/28745/. [↑](#footnote-ref-10)
11. Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, Riau: Dotplus Publisher, 2022:37. [↑](#footnote-ref-11)
12. Moh. Askin, Masidin, *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*, Jakarta : Kencana, 2023:203. [↑](#footnote-ref-12)
13. Budi Juliardi, *et.all*, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Gita Lentera, 2023:43. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid* [↑](#footnote-ref-14)
15. Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021:6. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid* [↑](#footnote-ref-16)
17. Marwan Effendy, Teori Hukum Dari Pespektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana, Jakarta: Referensi ME Centre Group, 2014:13. [↑](#footnote-ref-17)
18. M. Nasir Djamil*, Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013:44. [↑](#footnote-ref-18)
19. Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restrorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009:31. [↑](#footnote-ref-19)
20. Nafi’ Mubarok, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Mojokerto: Insight Mediatama, 2022:14. [↑](#footnote-ref-20)
21. Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lampung: Aura Publishing, 2019:18. [↑](#footnote-ref-21)
22. Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013:8. [↑](#footnote-ref-22)
23. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015:115. [↑](#footnote-ref-23)
24. Zainal Abidin, *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3 Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005:16. [↑](#footnote-ref-24)
25. Hanafi, “Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat”, *Voice Justisia*, 6(2), 2022:27. https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1937/1033. [↑](#footnote-ref-25)
26. Auliya Hamida, Joko Setiyono, “AnalisisKritisPerlindungan Terhadap AnakKorban Kekerasan Dalam Rumah Tangga:Kajian Perbandingan Hukum”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 2022:76. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13546/6839. [↑](#footnote-ref-26)
27. Ony Rosifany, “Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Perlindungan Anak”, *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5(2), 2021:95. http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/LG/article/view/5112/5267. [↑](#footnote-ref-27)
28. Ayu Intan Novelianna Setyono, Hadibah Zachra Wadjo, Yonna BeatrixSalamor, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual”, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 2021:13. https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/493/259. [↑](#footnote-ref-28)
29. Achmad, R., *Upaya Penyelelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, Palembang: Simbur Cahaya, 2005:6. [↑](#footnote-ref-29)
30. R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022:14-15. [↑](#footnote-ref-30)
31. Muhamad Arif Agus, Johari, “Perwalian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Perlindungan Hukum”, *Journal of Correctional Issues*, 5(2), 2022:91. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/115642767/93\_Article\_Text\_520\_4\_10\_20230105libre.pdf?1717499315. [↑](#footnote-ref-31)
32. Engine Kubota, Sandya Mahendra, Anis Nur Fauziyyah MS, “Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunhan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 2022:88-89. Diakses melalui https://proceedings.ums.ac.id/pdih/article/view/286/285, pada 1 Januari 2025, pukul 19:05 WIB. [↑](#footnote-ref-32)
33. Robby Bagus Indrawan, Risti Dwi Ramasari, “Dampak Hukum Perubahan Nama Pada Identitas Anak Terhadap Hak-Hak Keperdataan”, *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 2(1), 2022:124. https://yudishtira.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/28/30. [↑](#footnote-ref-33)
34. Mahendra, Alfian, and Beniharmoni Harefa, “Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana”, *Jurnal Kertha Semaya*, 8(10), 2020:1629-1649. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/60891/37015. [↑](#footnote-ref-34)
35. Gusti Ayu Trimita Sania, Anak Agung Sri Utari, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan”, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(3), 2020:1. https://jurnal.harianregional.com/kerthawicara/full-55084. [↑](#footnote-ref-35)
36. Maidin Gultom, Pe*rlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008:2. [↑](#footnote-ref-36)
37. Dewi Mulyati, Ali Dahwir, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan”, *Solusi*, 20(1), 2022:44. https://scholar.archive.org/work/oslidmonlncnpo5i3mzxt4vr3u /access/wayback/https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/download/469/455. [↑](#footnote-ref-37)
38. Samuel Panjaitan, Gomgom T.P. Siregar, Syawal Amry Siregar, “Peran BAPAS Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Pada BAPAS Kelas I Medan)”, *Jurnal Retentu*, 2(1), 2021:82. https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/905/763. [↑](#footnote-ref-38)
39. Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2012:44-47. [↑](#footnote-ref-39)
40. Sahata Manalu, Gokma Mariana Esterlina Pasaribu, “PERTAnggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Santri Di Pondok Pesantren (Putusan PN Tangerang No. 2121/Pid.Sus/2022)”, *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 5(1), 2024:71. https://ejournal.ust.ac.id/index.php/FIAT/article/view/4141. [↑](#footnote-ref-40)
41. Fariaman Laia, “Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak”, *Jurnal Panah Keadilan*, 2(1), 2023:78. https://www.jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/download/787/706. [↑](#footnote-ref-41)
42. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-42)
43. Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022:5-6. [↑](#footnote-ref-43)
44. Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education, 2012:19 [↑](#footnote-ref-44)
45. Dhiyaul Okasha Rafifa, Elwi Danil, Yoserwan, “Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Padang Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Tawuran Pelajar”, *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, 22(2), 2024:135. https://mail.ejournal.iaiibrahimy.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/ 2725/1222. [↑](#footnote-ref-45)
46. Rizki, *et.al*, “Tinjauan Yuridis terhadap Perkelahian antar Kelompok (Tawuran) yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur”, *Unes Law Review*, 6(4), 2024:11993. https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2137/1769. [↑](#footnote-ref-46)
47. Dony Suyudi, J. Jopie Gilalo, Muhamad Aminulloh, “Pelaksanaan Diversi Terhadap Pelaku Tawuran Pelajar Di Kota Bogor”, *Karimah Tauhid*, 4(1), 2025:23. https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/16849/6398. [↑](#footnote-ref-47)
48. Andi Taufiq,Sufirman Rahman, Hardianto Djanggih, “Efektifitas Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tawuran Kelompok”, *Journal of Lex Philosophy (Jlp)*, 5 (2), 2024:1407. http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1923. [↑](#footnote-ref-48)
49. Risti Dwi Ramasari, Aprinisa, Dewi Kautsar, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku TindakPidana Dengan Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam AtauSenjata Penusuk Yang Akan Digunakan Dalam Aksi Tawuran (Studi Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk)”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10 (21), 2024:714. http://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/ article/view/8636/7196. [↑](#footnote-ref-49)
50. Wahyu Shuhada, Ramadhan Syahmedi Siregar, “Analisis Yuridis dan Pandangan Hukum Pidana Islam Anak yang Membawa Senjata TajamUntuk Aksi Tawuran:Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn”, *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5 (6), 2023:3331. https://journal.laaroiba.com/index.php/reslaj/article/view/1070/2874. [↑](#footnote-ref-50)
51. Yusuf Hanafi Pasaribu, *et.al*, “Penyuluhan Tentang Tawuran Yang Berpotensi Tindak Pidana Di Era Digital Bagi Pelajar Di Lingkungan Kelurahan Teladan Barat”, *Jurnal Abdimas Upmi*, 3 (1), 2024:59. http://journal-upmi.com/index.php/abdimas/article/view/44/35. [↑](#footnote-ref-51)
52. M. Mustofa, *Perkelahian Massal Pelajar Antar Sekolah di DKI Jakarta Studi Kasus Berganda, Rekonstruksi Berdasarkan Paradigma Konstruksivisme*, Depok: UI, Depok, 1998: 37. [↑](#footnote-ref-52)
53. Anwar Sulaiman Nasution, Agus Salim Harahap, Yessi Kurnia Arjani Manik, “Pengaruh Literasi Hukum Terhadap Minat Tawuran Siswa SMK Swasta Dwiwarna Medan”, *Journal on Education*, 06(02), 2024:1582. https://www.jonedu.org/index.php/joe/article/view/5432/4321. [↑](#footnote-ref-53)
54. Dodi Alfayed Ritonga, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pembawa Senjata Tajam (Analisis Putusan no. 844/pid.sus/ 2018/pn.mdn)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, 2(3), 2021:4. https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/80. [↑](#footnote-ref-54)
55. Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1994:10 [↑](#footnote-ref-55)
56. Damar Bastiar, “Penegakanhukum Terhadap Penyalahgunaan Dan Pencegahan Pengguna Narkotika Di Indonesia”, *Jurnal Rechtens*, 8(2), 2019:214. https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/535/494. [↑](#footnote-ref-56)
57. Sahata Manalu, “Analisis Yuridis Tindakan Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penyidikan”, *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 1(1), 2020:114. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/77913538/pdf1-libre.pdf?1641177478=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DAnalisis\_Yuridis\_Tindakan\_Diskresi\_Kepol.pdf&. [↑](#footnote-ref-57)
58. Nur Ayuni, Firman Umar, Muhammad Akbal, “Strategi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Kota Makassar”, *Phinisi Integration Review*, 4(2), 2021:312. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/77629359/11397-libre.pdf?1640815998. [↑](#footnote-ref-58)
59. Muhammad Arif , “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya

    Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”, *Al Adl : Jurnal Hukum*, 13(1), 2021:97. https://scholar.archive.org/work/xrriak3dljcbfgt7gqideea4o4/ access/wayback/https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/4165/2744. [↑](#footnote-ref-59)
60. Agung Himawan, “Humanistic Educational Approach and Restorative Justice to Improve Adolescent Legal Compliance”, *International Journal of Research in Counseling*, 2(2), 2023:65. https://journal.minangdarussalam.or.id/index.php/ijrc/article/download/58/45/609. [↑](#footnote-ref-60)
61. Alifia Azizah Ilmi, Fauziah Nst, “Penerapan Layanan Bimbingan Kelompok dalam Menanggulangi Tawuran Antar Pelajar”, *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 3(2), 2024:2085. https://ssed.or.id/contents/article/view/743/440. [↑](#footnote-ref-61)
62. Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010:35. [↑](#footnote-ref-62)